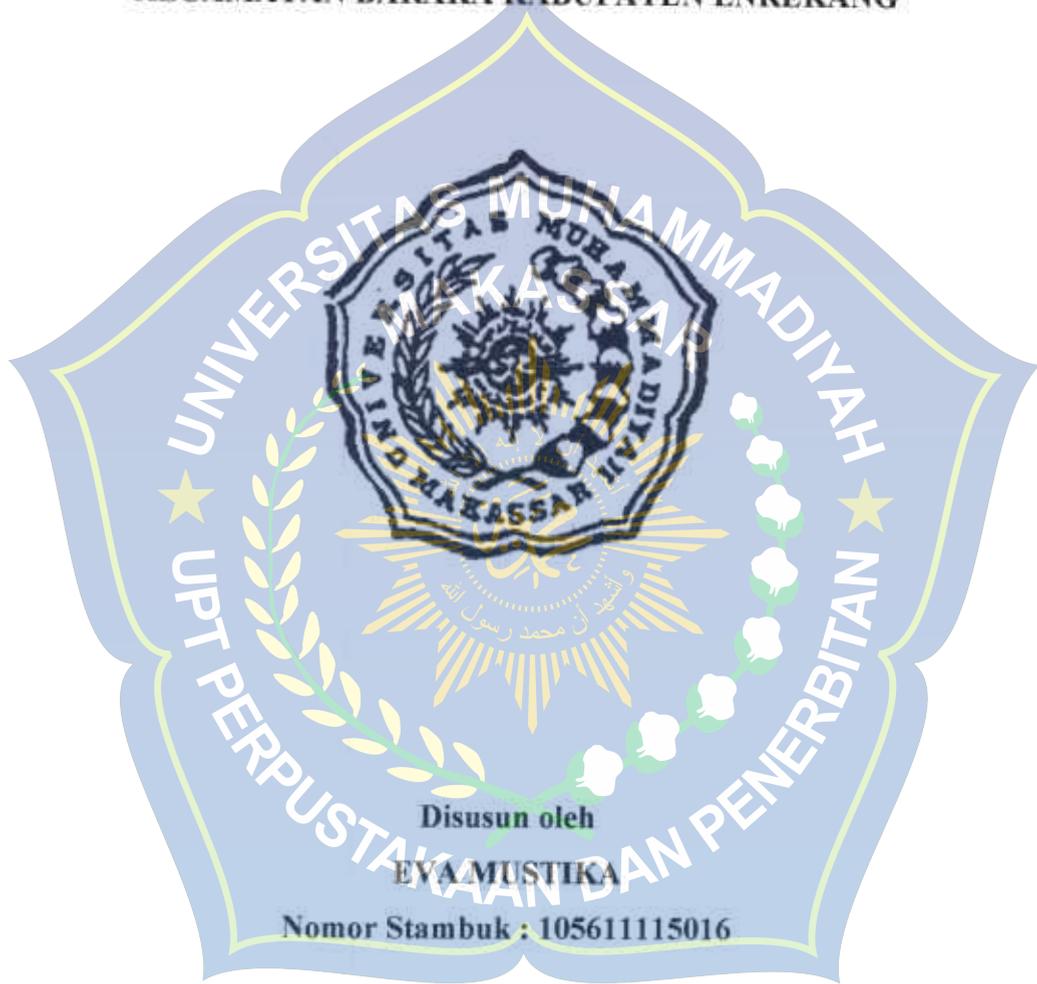


SKRIPSI

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
MANAJEMEN BENCANA DI DESA KADINGEH
KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
MANAJEMEN BENCANA DI DESA KADINGEH KECAMATAN
BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S. Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Eva Mustika

Nomor Stambuk: 105611115016

Kepada

08/03/2021

1 cc
Sub. Alumni

P/0007/ADM/2109
mus
h'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam
Manajemen Bencana di Desa Kadingeh
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Eva Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdi, M.Pd


Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM

()

2. Dr. Abdi, M.Pd

()

3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si

()

4. Andriana, S.IP., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eva Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115016

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Eva Mustika

ABSTRAK

Eva Mustika, Abdi, Adnan Ma'ruf. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan terdiri dari 8 orang antara lain : Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), staf Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Camat Baraka, Kepala Desa Kadingeh, dan masyarakat korban bencana. Data dikumpulkan dengan melakukan: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu : (1) Tanggungjawab secara bersama-sama dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja, masyarakat juga harus ikut andil dalam penanggulangan bencana. (2) Saling berkontribusi dalam penanggulangan bencana dengan mengerahkan semua kekuatan yang ada baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. (3) Mengarahkan kemampuan secara maksimal yaitu Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan. Faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Adanya program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat, Pemberdayaan sumber daya Manusia (SDM), Pendampingan. Faktor penghambat yaitu faktor geologis, kurangnya anggaran dana, Rusaknya fasilitas umum.

Kata kunci: kerjasama pemerintah masyarakat dan manajemen bencana

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Jhyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua prodi Ilmu Administrasi Negara, dan segenap dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir.
4. Pihak Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang, Camat Baraka, dan Desa Kadingeh.

5. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Selatan yang memberikan izin penelitian di Kabupaten Enrekang.
6. Orang tua tercinta saya, ayahanda Tapa dan ibu tercinta Ammi dan seluruh keluarga yang telah berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.
7. Teman-teman di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 016 terkhusus kelas D&E yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih yang tulus dan mendalam kepada sahabat terkasih Doko, Falli, Uni, Miss, Lia, Dinda, Ayu, Cika, Bunda Zul sebagai motivator dalam hidupku yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita juga memberi doa kepada saya.
9. Teman-teman KKP angkatan XIX Kab. Barru Kelurahan Coppo, Sulas, Anni, Sry, kak Jek, Putri, Ray. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman serta perjalanan yang sangat berarti dan proses pengabdian diri di Kecamatan Barru selama kurang lebih 2 bulan.
10. Dan Semua pihak yang membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya

membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 19 Oktober 2020



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LatarBelakang..... | 1 |
| B. RumusanMasalah..... | 5 |
| C. TujuanPenelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Pengertian Kerjasama..... | 8 |
| C. Pengertian Manajemen..... | 12 |
| D. Pengertian Bencana..... | 16 |
| E. Manajemen Penanggulangan dan Penanganan Bencana..... | 19 |
| F. Kerangka Pikir..... | 21 |
| G. Fokus Penelitian..... | 22 |
| H. Deskripsi Fokus..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 25 |
| A. Waktudan Lokas Penelitian..... | 25 |
| B. Jenisdan Tipe Penelitian..... | 25 |
| C. Sumber Data..... | 26 |
| D. Informan Penelitian..... | 26 |
| E. TeknikPengumpulan Data..... | 27 |
| F. TeknikAnalisis Data..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| G. Pengabsahan Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| A. Gambaran Umum Daerah Penelitian | 30 |
| B. Hasil Penelitian..... | 37 |
| C. Pembahasan Penelitian..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN..... | 68 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 79 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. Informan Penelitian | 27 |
| Tabel 4.1. Jumlah Penduduk..... | 31 |
| Tabel 4.2. Keadaan Bencana..... | 39 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam selama ini kerap dilihat sebagai *forcemajore* yaitu semua hal yang berada di luar kendali manusia oleh karena, untuk mengurangi korban akibat bencana dibutuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini alangkah bagusnya telah dimiliki oleh masyarakat setempat, karena mengetahui daerah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana.

Penanggulangan Bencana (PB) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari hingga memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan bencana. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana. Dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan bunyi "Setiap orang berhak mendapat perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung tentang penanggulangan bencana, ikut terlibat dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program bantuan pelayanan kesehatan serta ikut dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan bencana

termasuk berkaitan dengan individu dan kelompoknya dan melakukan pengawasan sesuai dengan cara yang diatur berdasarkan pelaksanaan penanggulangan bencana”. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi bencana adalah sebagai berikut : pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana (UNDP Indonesia, 2007).

Hutan dan pohon lebat sebagai pencegah utama tanah longsor tetap harus dijaga kelestariannya agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana karena pada dasarnya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan akibat tidak adanya kesadaran manusia yang tak bisa menjaga hutanyang merupakan alat utama resapan air. Ratusan nyawa yang tertimbun dalam bencana alam tanah longsor di Banjarnegara dan pangalengan beberapa tahun lalu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat lain yang bermukim di wilayah yang sama khususnya di Pulau Jawa hanya butuh waktu tak cukup dari 10 menit untuk menenggelamkan satu dusun dengan 300 lebih penduduk di banjarnegara, Jawa Tengah (Data BNPB, 2014).

Pada tanggal 30 April tahun 2019 yang lalu, data yang diperoleh di posko pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) BPBD Kabupaten Enrekang. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Enrekang ada 3 kali diantaranya kebakaran dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Baraka dan Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Enrekang. Namun bencana yang paling sering terjadi adalah tanah longsor. Ada 3 titik longsor yang terjadi di Desa Kadingeh diantaranya Dusun Tiktok yang

menyebabkan 42 rumah milik warga sudah tidak bisa ditempati lagi lantaran kondisi tanah sudah sangat miring dan juga ada sekitar 300 jiwa dari 100 kepala keluarga (KK) harus mengungsi akibat bencana tanah longsor serta jalan poros menuju Kecamatan mengalami rusak parah sehingga memutus akses utama menuju ke kecamatan bungin dan beberapa kebun masyarakat yang juga ikut tertimbun longsor. Wilayah Desa Kadingeh memang merupakan penghubung utama antara kecamatan Baraka dan kecamatan bungin. Wakil bupati Enrekang, Asman dan Kepala BPBD Enrekang telah meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Kadingeh mereka telah memerintahkan untuk merelokasi rumah warga yang telah mengalami keretakan dan kerusakan. (Tribun Timur.com, 2019)

Tanah longsor merupakan bencana alam yang telah memberikan banyak pengaruh pada dampak sosial dan ekonomi di masyarakat seperti rusaknya sarana umum, transportasi dan telekomunikasi bahkan tidak sedikit menelan korban jiwa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengurangi bencana supaya dampak dari adanya bencana longsor dapat di kurangi. Salah satu penyebab tanah longsor yaitu karena ulah manusia dan beberapa faktor geologi diantaranya hujan, tanah yang kurang padat, lereng yang terjal.

Pemerintah wajib berperan penting dalam melakukan penyuluhan akan pentingnya menjaga kelestarian alam sehingga masyarakat tidak seenaknya membuka lahan pertanian dengan tujuan meminimalisir terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, mengingat Kecamatan Baraka merupakan daerah pegunungan yang rawan terkena bencana tanah longsor.

Namun fakta yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, kenyataannya pemerintah belum berperan maksimal sehingga masyarakat tidak tertib dalam membuka lahan pertanian baru sehingga potensi terjadinya bencana menjadi lebih banyak. Selain pemerintah masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan bencana. Sebab merekalah yang mengetahui secara detail kondisi dan sifat-sifat entitas di sekitarnya.

Adapun peran masyarakat pada saat bencana antara lain, memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD atau instansi terkait, melakukan evakuasi mandiri, melakukan kaji cepat dampak bencana dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. Sementara itu peran masyarakat pada saat pasca bencana adalah berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Manajemen bencana yaitu segala upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang pada sebelum, sesaat dan setelah bencana.

Kesiapsiagaan dalam UU 24/2007 yaitu kesiapsiagaan yang dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan yang dimaksud adalah penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedararatan bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama, kolaborasi, dan partisipasi memiliki makna yang sama akan tetapi dalam judul ini digunakan

kata kerjasama karena pada umumnya masyarakat lebih mudah memahami makna tersebut dan lebih dominan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang diangkat dalam penelitian ini karena desa tersebut memang sangat berisiko terjadi bencana mengingat letak geografisnya yang sangat rentan terjadi bencana. Alasan utama ditambahkannya nama desa dalam penelitian ini karena penelitian ini lebih merujuk kepada desa tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan tentang pengembangan ilmu pemerintahan khususnya menyangkut Bencana Tanah longsor di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dari pemerintah daerah khususnya Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang agar menjaga lingkungan dan alam dalam hal ini yakni jajaran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sekaligus tetap menjunjung loyalitas tugas dan perannya sebagai aparatur pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang dibuat oleh Firman Wahyudi (2016) dengan judul Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Menanggulangi Bencana Asap di Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola komunikasi BPBD Provinsi Riau adalah pola roda. Pola roda terlihat karena penerapan pola komunikasi terstruktur dan terkoordinir oleh BPBD Riau. Pada saat mencegah bencana asap, pola roda tampak pada koordinasi yang dilakukan BPBD Riau. Pada saat menanggulangi bencana, pola roda digunakan juga dalam koordinasi dan komando serta briefing di Pos Komando BPBD Riau. Penggunaan media sosial memperkuat penggunaan pola roda. Seluruh stakeholder dapat berkomunikasi dengan semua unsur namun tetap berdasar pada struktur yang ada.

Jurnal Ahmad Syarif (2016) yang berjudul Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsure yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Ada 3 dimensi pentingnya komunikasi dan informasi, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kemudian pelaksanaan implementasi kebijakan dilihat dari empat faktor yang berperan penting yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Seluruh aspek atau dimensi masih dalam dalam kategori sedang.

Skripsi yang ditulis oleh Guspardi Femi (2015) dengan judul Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dari Nagari tangguh bencana mempunyai tujuan sasaran yang jelas, ada tim relawan PB Nagari yang secara aktif, adanya bantuan dari BPBD Provinsi dan BNPB. Kelemahan dari Nagari tangguh bencana kuangnya anggaran dana, belum lengkapnya sarana dan prasarana, masih banyaknya fasilitator yang belum paham bagaimana cara menerapkan strategi, masih sedikitnya anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB).

B. Pengertian Kerjasama

Menurut KBBI kerjasama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun pengertian kerjasama secara umum yaitu Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun menurut Zainuddin (2009) Kerjasama merupakan kepedulian suatu pihak atau dengan pihak yang lain yang tercemin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya nama yang mengatur, makna kerjasama yang dimaksud adalah

kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Thomson dan Perri dalam Keban (2007) Kerjasama mempunyai tingkatan berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada tingkat yang lebih tinggi *collaboration*.

Menurut Rosen dalam Keban (2007) secara teoritis, istilah kerjasama sudah sejak lama dikenal sebagai sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama sudah lama dikenal sebagai cara untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala.

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan Rosen dalam Keban (2007) bahwa bentuk perjanjian dibedakan (*form of agreement*) atas:

1. *Handshake agreements*, yaitu kerjasama yang dilakukan bukan atas perjanjian tertulis.
2. *Written agreements*, adalah kerjasama yang didasarkan perjanjian tertulis.

Adapun bentuk pengaturan dari kerjasama yaitu sebagai berikut:

1. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dengan cara berbagi sumberdaya.
2. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang.
3. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal.
4. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.

5. *Joint services*, adalah pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
6. *Contract services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan.
7. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya.

West (2002) menetapkan indikator kerjasama yaitu tanggung jawab secara bersama-sama, menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi, saling berkomunikasi dan mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Kerjasama terdapat beberapa faktor yang sangat penting seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercapai tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Individu dikatakan bekerja sama jika kegiatan dari setiap individu tersebut secara tersusun terintegasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kerjasama memberikan manfaat besar bagi kerja tim. Biasanya organisasi berbasis kerja tim yang memiliki susunan yang jelas. Oleh sebab itu, organisasi akan bisa merespons dengan cepat dan efektif lingkungan yang cepat berubah.

Adapun menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014) kerjasama merupakan pengelompokan diantara makhluk hidup. Kerjasama atau belajar bersama merupakan proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan dalam mencapai suatu tujuan. Kerjasama dapat menghilangkan hambatan akibat terbatasnya

pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jika lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, agar bisa menghargai orang lain, dan membangun persetujuan kerjasama.

Menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008) menyatakan kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu tugas secara bersama-sama, dalam kerjasama biasanya terjadi interaksi antar anggota/kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dicapai bersama-sama.

Adapun prinsip-prinsip umum menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2009) prinsip umum tersebut ada dalam prinsip *good governance* antara lain:

1. Transparansi dibangun atas dasar informasi bebas. Semua kegiatan pemerintahan, lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau.
2. Akuntabilitas yaitu Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
3. Partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mewakili.

4. Efisiensi dan Efektivitas yakni proses pemerintahan membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber daya sebaik mungkin.
5. Konsensus yaitu pemerintah yang baik bisa menjadi penghubung kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu kesepakatan bagi kelompok masyarakat.
6. Tegaknya Supremasi Hukum yaitu salah satu bagian dari hukum harus bersifat adil dan diberlakukan tanpa membeda-bedakan status, termasuk didalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

C. Pengertian Manajemen

Definisi manajemen, Manullang (Atik dan Ratminto, 2012) manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan menurut G.R. Terry (Hasibuan, 2009) mengartikan manajemen yaitu suatu proses yang khas yang berupaya tindakan perencanaan, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dua definisi diatas kelihatannya berbeda, tetapi apabila dicermati pada prinsipnya adalah sama. Yang dimaksud dengan proses oleh Gibson, dkk yaitu penerapan ilmu dan seni seperti yang dimaksud oleh Manullang, sedangkan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan oleh Gibson dkk disebut sebagai mengordinasikan berbagai kegiatan lain. Menurut

Ricky W. Griffin (2003) Manajemen merupakan suatu yang kompleks, menantang dan menarik.

1. Fungsi Manajemen

- a. Fungsi perencanaan adalah bagaimana menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian menyusun rencana bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Fungsi pengorganisasian yaitu Manajer telah menetapkan tujuan dan mengembangkan program untuk mencapainya, maka ia harus merancang sebuah organisasi yang dapat menjalankan itu dengan berhasil.
- c. Fungsi pengarahan adalah Setelah Rencana disusun, struktur organisasi telah dirancang, serta staf telah direkrut dan dilatih, maka langkah selanjutnya adalah mengatur gerakan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi pengawasan adalah upaya menilai kinerja yang berdasar kepada aturan yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan.

2. Ciri-ciri Manajemen

Ciri-ciri manajemen dalam kegiatannya yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam manajemen, ada pembagian kerja yang jelas dan tegas.
- b. Manajemen adalah suatu hal yang dapat dipelajari.
- c. Dalam mencapai tujuan terdapat pernyataan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, bahan, alat, waktu, dan ruangan.

- d. Pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten.
- e. Tujuan merupakan sasaran manajemen dan berusaha mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
- f. Manajemen digunakan dalam usaha kelompok, bukan usaha individu tertentu.

3. Prinsip-prinsip manajemen

Ada 14 prinsip manajemen oleh Henry Fayol yaitu:

a. Pembagian kerja (*division of work*)

Division of work atau spesialisasi pekerjaan kepada individu-individu dalam lingkaran manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan.

b. Wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab merupakan kunci didalam melakukan sebuah usaha.

c. Disiplin

Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Apabila wewenang tidak bisa berjalan semestinya maka bisa jadi disiplin akan hilang.

d. Kesatuan perintah

Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari satu alasan.

e. Kesatuan pengarahan

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karyawan harus diarahkan oleh seorang pemimpin dengan menggunakan satu rencana.

f. Subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum

Prinsip manajemen yang ini menyatakan bahwa tiap karyawan harus mengabdikan kepada kepentingan perusahaan atau organisasi.

g. Penggajian pegawai

Prinsip penggajian adalah tentang pembayaran upah dan cara pembayaran yang adil agar pegawai merasa puas.

h. Pemusatan

Merupakan prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi harus memiliki pusat.

i. Rangkaian perintah

Prinsip manajemen yang mengharuskan perintah agar selalu memilih jarak paling dekat.

j. Ketertiban

Bisa menjadi syarat yang utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja pada keadaan kacau.

k. Keadilan

Prinsip keadilan dianggap sering dianggap sebagai nilai-nilai inti dari suatu organisasi.

l. Stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian

Penempatan dan pengelolaan karyawan harus seimbang dengan layanan yang disediakan oleh organisasi.

m. Inisiatif

Karyawan harus diizinkan mengungkapkan ide-ide baru.

n. Semangat kesatuan sss

Semangat ksatuan merupakan prinsip manajemen dimana setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan senasib sepnanggungn yang bisa menciptakan semangat kerjasama yang lebih baik.

D. Pengertian Bencana

Bencana menurut UU Nomor 24 tahun 2007 yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alamdan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001) mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola kehidupan normal, bersifat merugikan manusia, struktur sosial serta muncul kebutuhan masyarakat.

Menurut Departmen Kesehatan RI (2001) definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar.Sedangkan pengertian bencana oleh WHO (2002) adalah kejadian yang mengakibatkan kerusakan, gangguan geologis, hilangnya nyawa manusia, memburuknya kesehatan atau pelayanan kesehatan pada tingkat tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah terkena.

Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007). Definisi lain menurut *Internasional Strategi For Disaster Reduction* (UN-ISDR-2002) adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau pelahan-lahan.

1. Jenis-Jenis Bencana

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dikenal beberapa istilah terkait dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Menurut Usep Solehudin (2005), pengelompokan bencana menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Bencana alam yaitu kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan air, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya.
- b. Bencana ulah manusia yaitu kejadian-kejadian karena perbuatan manusia seperti kebakaran, gangguan listrik, gangguan transportasi, dan lainnya.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana bisa digolongkan kedalam empat sumber bencana, yaitu:

- a. Ancaman klimatologis, yaitu sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa curah hujan tinggi, serta beberapa kejadian lain yang sangat erat kaitannya dengan iklim dan cuaca. Contoh: banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai, dan badai.
- b. Sumber ancaman geologis, yaitu terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, tsunami dan tanah longsor.
- c. Ancaman industri dan gagalnya teknologi, adalah sumber ancaman akibat kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi.
- d. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras, dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh: konflik bersejata dan pengusuran.

Sedangkan berdasarkan cakupan wilayah yang yang disebabkan oleh bencana terdiri dari:

- a. Bencana lokal adalah jenis bencana yang biasa memberikan pengaruh pada wilayah sekitarnya. Bencana ini biasanya terjadi akibat ulah manusia seperti kebakaran, ledakan, dan lainnya.
- b. Bencana regional adalah jenis bencana ini memberikan pengaruh pada arah geografis yang cukup luas, biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti, badai, letusan gunung, tornado dan lainnya.

2. Fase-Fase Bencana

Menurut Barbara Santamari (2009), ada 3 fase dalam terjadinya suatu bencana, yaitu *fase preinfact*, *fase infact*, *fase postinfact*.

- a. Fase *preinfact* merupakan *warning pase*, tahap awal dari bencana informasi didapatkan dari bahan satelit dan meteorologi cuaca, seharusnya pada pase inilah persiapan dilakukan, baik oleh pemerintah lembaga dan warga masyarakat.
- b. Fase *infact* merupakan pase terjadinya klimaks dari bencana inilah saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk berahan hidup (*survice*). Fase *impact* ini terus berlanjut hingga terjadinya hingga terjadinya kerusakan dan bantuan-bantuan darurat dilakukan.
- c. Fase *postinfact* adalah merupakan dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat.

E. Manajemen Penanggulangan dan Pencegahan Bencana

Kerusakan lingkungan semakin hari terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tercipta ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Langkah awal untuk melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru lingkungan nasional.

Menurut Nurjannah, dkk (2010), upaya-upaya penanggulangan bencana yaitu:

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga dikatakan sebagai penjinak bencana alam. pada prinsipnya mitigasi yaitu suatu usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik baik berupa penataan ruang kawasan bencana sedangkan persiapan non fisik berupa pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman

Adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang penanggulangan bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2000 yang lalu, menyatakan bahwa "Negara-Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada di wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia pada mereka" seperti:

- a. Membentuk tim penanggulangan bencana
- b. Membentuk penyuluhan-penyuluhan
- c. Merelokasi korban secara bertahap

Menurut Ramli (2010), upaya-upaya pencegahan bencana alam yaitu:

1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah enggan mendirikan pos pelayanan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

yaitu dengan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menantinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

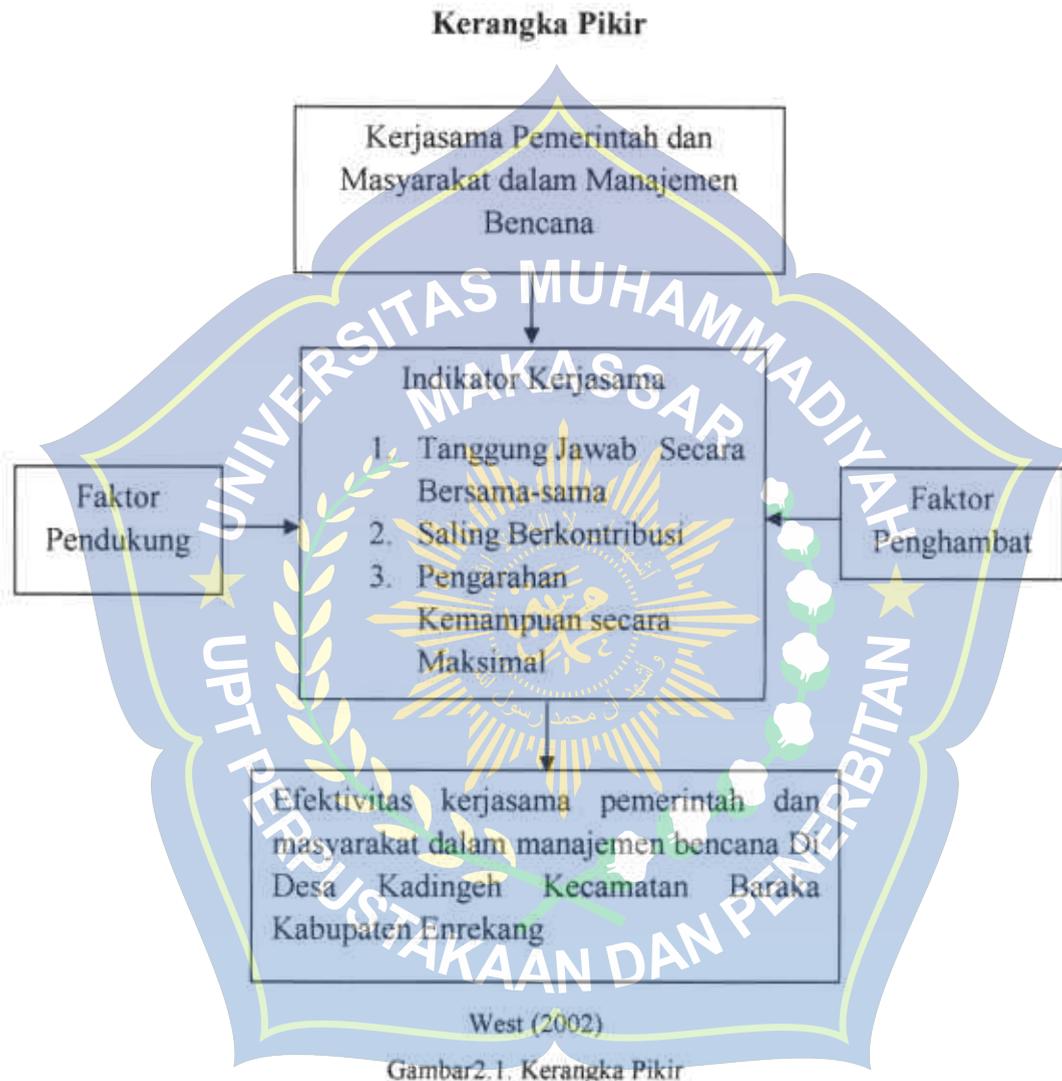
Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang langkah pengurangan bencana alam, yang diselenggarakan pada 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang

F. Kerangka Pikir

Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah atau instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti manajemen bencana harus bekerja dengan disiplin, efisien, dan efektif. Dengan demikian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan kinerjanya dapat dirasakan oleh semua element masyarakat daerah.

Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan sejauh mana kerjasama pemerintah dan masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dari dampak bencana baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Tak luput dari membahas perlindungan terhadap masyarakat, penulis dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai indikator kerjasama yang dikemukakan West (2002) yaitu: tanggung

jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi dan pengarahan kemampuan secara bersama-sama.



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tanggung jawab secara bersama-sama antara kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, saling berkontribusi antara kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang serta

mengarahkan kemampuan maksimal baik dari pemerintah maupun masyarakat yang melakukan kerjasama.

H. Deskripsi Fokus

Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung jawab secara bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan (di Desa Kadingeh).

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam hal ini ada beberapa dinas yang ikut terlibat yaitu dinas pekerjaan umum tugasnya memberi bantuan berupa alat berat untuk perbaikan jalan yang rusak, dinas kesehatan ditugaskan untuk memberi obat-obatan apa bila ada yang membutuhkan, Badan Penanggulangan Bencana mengarahkan anggotanya.

2. Saling berkontribusi (di Desa Kadingeh).

Pemerintah dan masyarakat melibatkan diri dalam meminimalisir terjadinya bencana. Kontribusi dari masyarakat yaitu berupa memberikan informasi kejadian bencana kepada BPBD, melakukan evakuasi mandiri, adapun kontribusi dari pemerintah yaitu membuat pos peringatan bencana dan memberi himbauan tentang bahaya bencana.

3. Pengarahan kemampuan secara maksimal (di Desa Kadingeh).

Pemerintah membagi setiap anggotanya berdasarkan kemampuan masing-masing dalam membantu warga misalnya pada dinas kesehatan ditugaskan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan obat-obatan, dinas sosial

ditugaskan untuk bantuan relokasi sementara, bantuan tim penolong, serta bantuan peralatan darurat, dan camat melaporkan titik-titik rawan bencana ke BPBD untuk mitigasi atau pencegahan bencana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Mengingat lokasi tersebut rawan terjadi bencana.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi dan wawancara pada informan, sebagai gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan dan hasil pelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi, untuk mengetahui kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran dan penjelasan berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil Observasi dilokasi penelitian, wawancara langsung dari informan, dan dokumentasi berupa gambar yang diambil yang diambil dilokasi penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penelitian bersumber dari bahan bacaan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat berupa buku paket, jurnal, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dengan menggunakan purposive. Sedangkan pengertian purposive sendiri adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlihat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

Tabel3.1. Informan Penelitian di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

| NO | Nama | Inisial | Jabatan | Ket. |
|--------|--------------------------|---------|---|------|
| 1 | Usman, ST, MM | US | Kepala Bidang BPBD | 1 |
| 2 | Sutrisno, SE. SKM. MM | ST | Kepala Dinas Kesehatan | 1 |
| 3 | Usman Rahmat, S.Kom | UR | Staf Dinas Sosial Kabupaten Enrekang | 1 |
| 4 | M. Gamaluddin, ST | GN | Camat Baraka | 1 |
| 5 | Umar, S.Pd.I | UR | Kepala Desa Kadingeh | 1 |
| 6 | Suriati | SR | Masyarakat Desa Kadingeh | 3 |
| 7 | Taslim | TS | Masyarakat Desa Kadingeh | |
| 8 | Udi | UD | Masyarakat Desa Kadingeh | |
| Jumlah | | | | 8 |

Sumber data : Kantor Desa Kadingeh 2020

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Observasi adalah meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian.
2. Teknik Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan ciri utama berupa kontak langsung dengan tatap muka antara sipencari informasi dan sumber informasi.
3. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti dokumentasi dapat berupa foto atau lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data yang diperoleh secara sistematis data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data sesuai standar yang ditetapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat ditarik.

3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informan yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwa menjadi mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab

akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Pengabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang ditimbulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Sugiyono (2006) menjelaskan ada 3 macam triangulasi:

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
3. Triangulasi waktu yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ}14'36''$ LS – $119^{\circ}40'53''$ BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Toraja dan Kabupaten Pinrang dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Jarak Ibukota Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km melalui Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Kondisi geografis Kecamatan Baraka dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1-700 m, dengan tofografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas wilayah Baraka 159,15 km².

Jarak Desa Kadingeh dari ke Kecamatan Baraka adalah 13 km sedangkan jarak ke ibukota kabupaten sejauh 49 km. Desa Kadingeh merupakan desa terakhir di kecamatan baraka dan berbatasan langsung dengan kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Bungin. Adapun batas wilayah desa kadingeh yaitu:

Batas barat : Gunung Cullade

Batas Selatan : Kecamatan Bungin

Batas Timur : Kecamatan Buntu Batu

Batas Utara : Desa Banti

2. Luas

Luas wilayah Kabupaten Enrekang 1.786,01 km² yang meliputi 12 kecamatan Selanjutnya dari 12 kecamatan terdapat 112 desa/kelurahan yaitu 17 kelurahan dan 95 desa yang masing-masing dipimpin oleh Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Adapun jumlah penduduk 190.579 jiwa.

Kecamatan Baraka dengan ketinggian dari permukaan laut 500-1000 m dengan kondisi topografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas wilayah Kecamatan Baraka 152 km². Kecamatan Baraka terdiri dari 3 kelurahan dan 12 desa.

Desa kadingeh berada diketinggian 500-1000 m dari permukaan laut. Luas wilayah desa kadingeh 13 km² dan terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun deakaju, dusun ti tok, dusun asaan, dan dusun lombok.

3. Keadaan Penduduk

Adapun Jumlah penduduk di Kecamatan Baraka dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Baraka

| No | Desa/Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Kadingeh | 663 | 616 | 1.279 |
| 2. | Janggurara | 662 | 672 | 1.194 |
| 3. | Banti | 819 | 760 | 1.592 |
| 4. | Perangian | 507 | 451 | 958 |
| 5. | Parinding | 753 | 752 | 1.505 |
| 6. | Tomenawa | 1.033 | 1.049 | 2.082 |

| | | | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 7. | Baraka | 1.310 | 1.427 | 2.737 |
| 8. | Bontongan | 1.421 | 1.347 | 2.768 |
| 9. | Pepadungan | 628 | 657 | 1.285 |
| 10. | Kendenan | 650 | 626 | 1.276 |
| 11. | Salukanan | 574 | 576 | 1.150 |
| 12. | Tiro Wali | 474 | 498 | 963 |
| 13. | Pandung Batu | 620 | 580 | 1.200 |
| 14. | Balla | 912 | 899 | 1.811 |
| 15. | Bone-Bone | 460 | 392 | 852 |
| | Jumlah | 11.446 | 11.193 | 22.639 |

Sumber data: Kantor Camat Baraka 2020

4. Penggunaan Lahan

Kabupaten Enrekang adalah suatu wilayah yang memiliki kualitas sumber daya alam yang cukup baik sehingga Enrekang memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam yang dilihat dari beberapa sektor seperti sektor pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, sector kehutanan, sector pertambangan dan energi, dan sector pariwisata.

Enrekang yang terdiri dari duabelas Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Baraka dimana Kecamatan Baraka ini terdapat Desa Kadingeh yang sangat terpencil yang kadang susah untuk dijangkau oleh masyarakat lain, hal ini disebabkan karena infrastruktur yang tidak baik. Meskipun daerah ini sangat terpencil akan tetapi tersedia sumber daya alam yang baik dimana masyarakat di Desa Kadingeh terutama Dusun Ti'tok sangat memanfaatkannya. Sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Ti'tok adalah terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan seperti Padi, Jagung, Cabe, Kopi, Kakao, Lada,

Cengkeh dan juga sayur-sayuran seperti Kol, Buncis, Sawi, Tomat, dan bawang merah.

5. Keadaan Topografi

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah kabupaten Enrekang sedangkan yang latar hanya 15,04%.

6. Kemiringan Lereng

Secara umum Kabupaten Enrekang pedataran bergelombang dengan kemiringan lereng bergelombang atau miring ($8-13^\circ$) dengan perbedaan tinggi 20-70 meter terletak pada ketinggian 41-109 meter dari permukaan laut meliputi daerah maiwa, Maroangin dan kota Enrekang, perbukitan dengan kemiringan lereng tersayat tajam atau terjal ($20-55^\circ$), dengan beda tinggi 200-500 meter terletak pada ketinggian 115-600 meter dari permukaan laut yang meliputi daerah Cakke, Belajen, Alla, Maiwa Timur dan kota Enrekang Timur. Pengumuman denan kemiringan lereng sangat tajam/curam ($55-90^\circ$) dengan beda Tinggi > 500 meter terletak pada ketinggian 631-3318 meter dari permukaan laut yang meliputi Baraka, Bungin, Tallang Riaja, Karrang, Gunung Ranremario dan Gunung Nenemori.

7. Visi dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Koordinasi Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Solid Menuju Enrekang Maju Aman Dan Sejahtera (Emas) Yang Berkelanjutan dan Religius “

Visi yang telah ditetapkan oleh unit kerja Kantor Kecamatan Baraka mengandung makna :

1. **TERWUJUDNYA KOORDINASI PEMERINTAHAN:** Memiliki makna bahwa Kantor Kecamatan Baraka mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan tanpa memandang unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. **PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN:** memiliki arti bahwa Kantor Kecamatan Baraka dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa memandang satu sama lain.
3. **MENUJU KABUPATEN ENREKANG:** Dalam pengertian bahwa yang menjadi fokus terwujudnya visi dan misi adalah Kabupaten Enrekang sehingga menjadi tekad dan gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk memajukan Kabupaten Enrekang secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

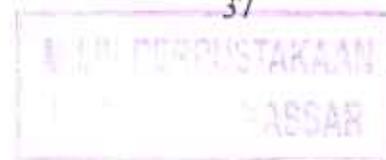
4. MAJU: Dalam artian bahwa pembangunan pembangunan yang terimplementasi di Kecamatan Baraka dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5. AMAN: Dalam artian bahwa dalam menjalankan aktivitasnya seluruh masyarakat dapat bergerak dengan bebas tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Keadaan aman ini menjadi prasyarat untuk mewujudkan kondisi wilayah di Kecamatan Baraka sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Enrekang.
6. SEJAHTERA : Dalam artian bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat adalah untuk memenuhi kesejahteraan. Ketercukupan masyarakat ini harus dirasakan oleh masyarakat khususnya di bidang layanan dasar dan bidang layanan pilihan yang diimbang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
7. ENREKANG BERKELANJUTAN : selain mengandung makna pembangunan di Enrekang yang lebih akseleratif dan berkesinambungan antar periode dan tahapan pembangunan yang dijalani sehingga tercipta Enrekang yang lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera (EMAS), juga dimaknai dengan pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Selain itu, dalam paradigma dan perspektif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dianut dewasa ini, memastikan

penyelenggaraan empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni: pilar pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, lingkungan hidup, tata kelola yang baik.

8. **ENREKANG YANG RELIGIUS** : mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Enrekang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indiscipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Enrekang sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Dengan misi diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peranan serta program yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil dan mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi, maka misi yang diemban oleh Kantor Kecamatan Baraka adalah:



1. Menciptakan aparatur pemerintah yang berorientasi pelayanan prima, proporsional dan transparansi.
2. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif dan efektif serta mampu memberdayakan masyarakat.
3. Melakukan hubungan koordinasi dan sinkronisasi antara unit kerja Pemerintah Kabupaten Enrekang.
4. Menciptakan hubungan koordinasi dan terpadu antara seksi yang ada dalam organisasi Kecamatan Baraka.
5. Melakukan pembinaan, pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur saling Sipakatau Sipangingaran.
7. Mendayagunakan informasi potensi Kecamatan Baraka dan sumber daya serta Data Base untuk perencanaan, melalui pendekatan dan pemamfaatan sistem informasi yang optimal.
8. Mengedepankan kepentingan organisasi Kecamatan maupun Kabupaten serta masyarakat Enrekang.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Informan

Pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurut. Pada bagian pertama

penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain: Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, Camat Kecamatan Baraka, Kepala Desa Kadingeh serta Masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dilanjutkan penulis akan membahas bagaimana Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen bencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari enam orang diantaranya adalah :

1. US adalah seorang kepala bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, Pendidikan terakhir adalah S2 Pendidikan. US juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang.
2. GN adalah Camat Baraka Kabupaten Enrekang, Pendidikan terakhir adalah Sarjana Teknik S1. GN juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Enrekang.
3. UR adalah Kepala Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pendidikan terakhir adalah S1 Pendidikan.
4. SR adalah masyarakat desa Kadingeh yang menjadi korban dari bencana (longsor) yang pernah terjadi Dusun Ti'tok desa kadingeh.

5. TS adalah masyarakat desa Kadingeh yang menjadi korban bencana (Longsor).
6. UD adalah masyarakat desa Kadingeh Dusun Ti'tok yang menjadi korban bencana Longsor

2. Jenis bencana tanah longsor yang pernah terjadi 3 tahun terakhir di Desa Kadingeh

Tabel 4.2. Keadaan bencana di Desa Kadingeh

| No | Tgl. Kejadian | Desa | Jenis Bencana | Korban | | |
|----|---------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Lk. Ringan | Lk. Berat | Meninggal |
| 1 | 27/07/18 | Kadingeh | Longsor | - | - | - |
| 2 | 11/02/19 | Kadingeh | Longsor | - | - | - |
| 3 | 30/04/19 | Kadingeh | Longsor | - | - | - |
| 4 | 03/09/20 | Kadingeh | Longsor | - | - | - |

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Enrekang 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bencana tanah longsor dalam 3 tahun terakhir di Desa Kadingeh terjadi sebanyak 4 kali dan pada tahun 2019 terjadi sebanyak 2 kali. Bencana tanah longsor tersebut tidak menelan korban jiwa namun masyarakat mengalami banyak kerugian.

3. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

a. Tanggungjawab Bersama

Pemerintah dan masyarakat daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung

jawab itu dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Tentu saja upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dimaksud dalam hal ini ialah pemerintah yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dini kepada masyarakat demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja. Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Adapun bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat yaitu seperti sosialisasi tentang penghijauan, Memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, bergotong royong membantu masyarakat yang berdampak bencana, serta membuat sistem peringatan dini mengenai bencana alam.

Dari tanggapan masyarakat tentang hal tersebut masyarakat merespon baik sama halnya pasca terjadi bencana tanah longsor pemerintah turun langsung untuk membantu masyarakat lain yang berdampak bencana

baik bantuan berupa tenaga maupun materi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama pemerintah dalam hal ini sudah cukup bagus namun masih perlu dimaksimalkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor mengingat daerah tersebut memang rawan terjadi bencana khususnya tanah longsor. Dalam hal ini penanggungjawab bersama-sama yaitu pemerintah dan masyarakat dimana peran pemerintah sangat penting bagi penanggulangan bencana peran pemerintah yaitu menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional.

Adapun masyarakat berperan serta dalam perencanaan, memelihara keseimbangan dengan tidak melakukan pembukaan lahan pertanian baru demi kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya pencegahan bencana, Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam upaya mitigasi, bersedia bekerjasama mewujudkan Desa tangguh bencana. Terkait tentang kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam manajemen bencana, seperti wawancara dengan kepala bidang BPBD sebagai berikut:

“Sebagai Kepala bidang BPBD saya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan peran dalam pengurangan Bencana seperti Sosialisasi tentang penghijauan, Memberikan sanksi kepada Masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, serta membuat system peringatan dini mengenai Bencana Alam”
(Hasil wawancara US, 2 September 2020)

Hasil wawancara dengan kepala bidang BPBD mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam penanggulangan bencana dan hal-hal yang dapat dilakukan dalam menanggulangi bencana seperti

penghijauan misalnya menanam pohon dan tidak melakukan penebangan liar.

Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Enrekang

“Saya selaku staf dinas sosial bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan rehabilitasi terhadap rumah warga yang berdampak longsor dananya juga sudah disiapkan oleh pemerintah dan dalam masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya rehabilitasi tersebut” (hasil wawancara dengan UR, 7 September 2020).

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa dalam upaya merehabilitasi rumah warga yang berdampak longsor masyarakat juga ikut melibatkan diri.

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu masyarakat yang ada di kecamatan Kecamatan Baraka khususnya di Desa Kadingeh yang mengatakan bahwa

“Iya, kami masyarakat di Dusun Ti'tok ini bertanggung jawab dalam hal pengurangan Bencana seperti tidak melakukan pembukaan lahan pertanian baru, melakukan upaya pencegahan Bencana, Bekerjasama pemerintah dalam upaya Mitigasi, bersedia bekerjasama mewujudkan Desa tangguh” (Hasil wawancara SR,24 September 2020).

Selanjutnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana sudah ada yaitu sebagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana.

Sebagaimana wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kadingeh dusun ti'tok sebagai berikut:

“Kami bersama warga lainnya melakukan kerjasama dan melaksanakan peran kami sebagai masyarakat dalam penanggulangan bencana misalnya dengan melaksanakan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah dan ikut terlibat dalam upaya penanggulangan bencana ”. (Hasil wawancara TS, 27 September 2020)

Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana, kerjasama pemerintah dan masyarakat itu sendiri seperti kerjasama antar instansi/dinas terkait agar semua permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan sesuai harapan.

Terkait tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, seperti wawancara dengan Camat Baraka, sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama ini bagus, karena sudah jauh sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi pemahaman tentang kebencanaan dan pada saat terjadi bencana. Alhamdulillah masyarakat juga dengan pemerintah serentak membantu keluarga yang terkena bencana itu.” (Hasil wawancara GN, 26 September 2020)

Dari hasil wawancara dengan Camat Baraka diatas mengatakan bahwa masyarakat yang ada Kecamatan Baraka telah bekerjasama dengan baik. Ini terlihat ketika terjadi bencana masyarakat bersama pemerintah bahu membahu membantu warga lain yang terkena dampak resiko bencana. Dimana bekal tersebut didapat dari hasil sosialisai pemerintah untuk mengantisipasi datangnya bencana, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat sudah tahu langkah yang akan dilakukan untuk meyelamatkan diri sampai menolong warga lain yang terkena dampak bencana.

Pernyataan tokoh masyarakat diatas mengungkapkan kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam

mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat longsor, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisasi prabencana. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi, merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana yaitu legitimasi.

Wawancara dengan salah satu masyarakat terkena bencana sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat yang tinggal di dusun Ti'tok Kecamatan Baraka yang dimana sering terkena Bencana longsor peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dan harus diterapkan agar Bencana longsor dapat diminimalisir mengingat dusun ti'tok merupakan dusun yang rawan terkena bencana” (Hasil wawancara UD, 24 September 2020).

Dari pernyataan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab secara bersama yaitu pemerintah telah mengarahkan segala kemampuannya dalam upaya menanggulangi bencana seperti melakukan sosialisasi dan masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menanggulangi bencana dan pasca terjadi bencana pemerintah dan masyarakat sangat antusias dalam membantu warga yang berdampak bencana.

b. Saling Berkontribusi

Berkontribusi berasal dari kata kontribusi yang artinya sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Semakin besar

integritasnya semakin besar tingkat kerjasamanya, kontribusi pemerintah sangat penting bagi penanggulangan bencana, dalam hal ini kontribusi dari pihak pemerintah di Kecamatan Baraka yaitu turun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau para korban dan memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian. Pemerintah dan masyarakat saling berkontribusi dalam penanggulangan bencana baik fikiran maupun tenaga.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang.

“dalam hal upaya penanggulangan bencana kami selaku dari Dinas Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana melakukan mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat serta memberi bantaun berupa obat-obatan” (hasil wawancara ST 28, September 2020).

Hasil wawancara diatas mengatakan dinas kesehatan sudah berupaya dalam mengurangi segala risiko terjadinya bencana.

Adapun penuturan wawancara dengan Camat Baraka sebagai berikut:

“Saya selaku Camat di Baraka berbicara mengenai kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana sudah sangat baik yaitu berupa tenaga dan fikiran seperti memberikan arahan kepada masyarakat mengenai bahaya longsor dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka” (Hasil wawancara GN 26, September 2020).

Dari hasil wawancara dilihat bahwa pemerintah sudah mengarahkan kemampuan berupa tenaga dan fikirannya dalam dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana. Dari penuturan salah satu masyarakat

mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu instruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat.

Adapun penuturan dari salah satu masyarakat di Desa Kadingeh yaitu:

“Saya selaku warga di Desa kadingeh merasa kontribusi pemerintah terhadap penaggulangan bencana sudah cukup baik namun agak terlambat karena jalanan akibat longsor sulit dilewati. (Hasil wawancara SR, 24, September 2020)

Sama halnya dengan penuturan warga lain yang juga merupakan warga di Desa Kadingeh, yang mengatakan bahwa pemerintah terlambat mengunjungi lokasi kejadian ketika terjadi bencana.

Seperti wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kadingeh:

“iya memang pemerintah ikut andil dalam penanggulangan bencana, tapi mereka lambat ke tempat kejadian jika ada bencana. (Hasil wawancara UD, 24 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa pemerintah lambat turun ke lokasi kejadian ketika terjadi bencana dan masyarakat menyayangkan hal tersebut, karena menurut sebagian masyarakat mereka sangat membutuhkan pemerintah dalam upaya pembenahan di lokasi kejadian bencana.

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh Kepala Desa Kadingeh sebagai berikut:

“Saya selaku Kepala Desa Kadingeh berusaha untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat yang lain untuk bersama-sama

melakukan pengawasan dini khususnya di daerah yang rawan akan bencana. (Hasil wawancara UR, 24 September 2020)

Dari pernyataan informan tersebut peran pemerintah juga saat ini telah mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dini khususnya daerah yang rawan terkena bencana. Pemerintah menjalin hubungan dan menyadarkan masyarakat agar mudah menjaga lingkungannya demi mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Berkaitan wawancara dengan informan di atas, wawancara dengan Camat Baraka juga memberikan asumsi sebagai berikut:

“Dalam hal penanganan bencana alam kami selaku pemerintah Daerah Camat Baraka kami melakukan pelatihan dalam wilayah yang masuk daerah rawan bencana yang diberikan oleh BPBD.” (Hasil wawancara GN, 26 September 2020).

Berdasarkan keterangan dari Camat Baraka bahwa mereka sudah melakukan pelatihan misalnya cara menjaga kelestarian lingkungan terutama daerah yang rawan terkena bencana.

Kesimpulan yang dapat diambil dari saling berkontribusi yaitu pemerintah telah mengarahkan kemampuan baik berupa tenaga maupun pikiran namun ada juga warga yang berpendapat bahwa pemerintah lambat turun ke lokasi kejadian ketika terjadi bencana dan masyarakat sangat menyangkan hal tersebut.

c. Pengarahan kemampuan secara maksimal

Pengarahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan seluruh anggota baik itu masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini pengarahan kemampuan secara

maksimal dari pihak pemerintah di Kecamatan Baraka yaitu baik dari segi pikiran dan tenaga contohnya memberikan bantuan kepada para korban bencana. Dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan. Sedangkan dari pihak masyarakat pengarahan kemampuan secara maksimal di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu ikut andil dalam membantu korban bencana yang terjadi di daerahnya dengan membantu sebisa mungkin untuk mengurangi beban para korban bencana, dan tentunya masyarakat tetap menerima arahan dari pemerintah setempat.

Berikut ini adalah wawancara dengan kepala bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang bidang perencanaan dan Kesiapsiagaan mengenai pengurangan lokasi bencana sebagai berikut:

“Saya yang selaku kepala Bidang BPBD mempunyai peran dalam mengkordinasi lokasi yang rawan bencana misalnya tanah longsor, bila musim hujan tiba sering kita terjun ke lokasi mengecek daerah mana saja yang rawan bencana dan kita arahkan kepada aparat desa setempat dan masyarakat untuk sesegera mungkin melaporkan jika ada kejadian di desa masing-masing.” (Hasil wawancara US, 25 Agustus 2020)

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang memberikan penjelasan tentang perannya dalam mengurangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan mengarahkan semua instansi yang terkait, karena

dengan hal tersebut barulah sebuah perencanaan matang dapat dibuat untuk mengurangi bencana.

Senada dengan yang disampaikan oleh Camat Baraka sebagai berikut:

“Dalam mengurangi dampak bencana alam, saya selaku Camat di Kecamatan baraka mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan seluruh masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan kelestarian alam sehingga dampak bencana dapat di minimalisir.” (Hasil wawancara GN, 26 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dan pengamatan langsung oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dalam mengurangi dampak bencana alam Camat menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan masyarakatnya agar melakukan kerjasama untuk meminimalisir dampak bencana.

Berikut adalah wawancara dengan Kepala Desa Kadingeh:

“Saya selaku kepala Desa Kadingeh mendapat arahan langsung dari pak Camat dan dari BPBD Kabupaten Enrekang agar kiranya memberikan arahan kepada warga saya untuk bekerjasama/gotong royong sebelum datang bantuan dari Kecamatan atau Kabupaten.” (Hasil wawancara UR, 24 September 2020)

Wawancara berikut sehubungan dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Kadingeh tentang yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana.

Sebagaimana wawancara dengan beberapa Masyarakat korban bencana di

Desa Kadingeh sebagai berikut:

“Kami mengikuti arahan dari Kepala Desa mengenai upaya untuk mengurangi dampak bencana dan melaporkan sesegera mungkin misalkan ada tanda-tana tanah yang akan longsor kepada instansi yang terkait serta gotong-royong dalam kegiatan pemerintah dalam menangani bencana. Hasil wawancara (SR, 24, September 2020)

Informan berikutnya juga ikut menambahkan:

“Saya selaku masyarakat selalu ikut terlibat dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Desa, misalnya jika ada bencana saya selaku masyarakat akan ikut serta dalam membantu korban dan ikut gotong royong membantu membantu korban bencana bersama dengan masyarakat dan pemerintah setempat” (Hasil wawancara TS, 24 September 2020)

Berdasarkan keterangan dua informasi masyarakat di Desa Kadingeh mengenai pengarahannya kemampuan secara maksimal dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dari penuturan di atas menjelaskan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu bekerjasama dengan baik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini mengatakan bahwa masyarakat sudah bekerja sama dengan baik oleh pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kecamatan Baraka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengarahannya kemampuan sudah dilakukan semaksimal mungkin.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

1. Faktor Pendukung

Dalam menanggulangi bencana, baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat daerah dalam menanggulangi bencana. Adapun kaitannya dengan faktor pendukung Kerjasama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Baraka dalam manajemen bencana.

Wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka sebagai berikut:

“Faktor pendukung Pemerintah dalam menanggulangi bencana, sejauh ini baik dari pemerintah, Dinas, Instansi, dan Masyarakat Enrekang sama-sama bekerja dalam menanggulangi musibah. Kemudian pemerintah juga menjalankan program tanggap darurat bencana alam”. (Hasil wawancara SR, 2 September 2020).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang di atas tentunya memberikan penjelasan tentang faktor pendukung kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Baraka. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang baik dapat mendukung suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Wawancara berikutnya dengan Camat Baraka dan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai faktor pendukung kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen bencana sebagai berikut

Wawancara dengan Camat Baraka tentang faktor pendukung terjadinya bencana

“Kami selaku pemerintah daerah berupaya memberikan sosialisasi tentang bahaya longsor kepada masyarakat, terus berupaya

menambah wawasan masyarakat tentang bahaya rawan bencana, khususnya tanah longsor, mengingat Kecamatan Baraka adalah daerah yang sepenuhnya daerah pegunungan. Jadi untuk mendukung penanggulangan bencana seperti tanah longsor yang kami fokuskan adalah memperbaiki SDM.” (Hasil wawancara GN, 26 September 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa Camat Baraka berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor pendukung penanggulangan bencana alam khususnya tanah longsor. Penulis menyimpulkan apabila sumberdaya manusia diperbaiki dan masing-masing mengambil peran aktif dalam manajemen bencana, hal ini bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya.

Wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang Faktor dalam menanggulangi bencana tanah longsor sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam penanggulangan bencana, misalnya tanah longsor meliputi pengetahuan terhadap resiko bencana kebijakan darurat bencana dan mendampingi masyarakat dengan bersama-sama menjalankan program yang diberikan oleh atasan kami, juga sudah memberikan beberapa tanda-tanda aka rawan bencana, khususnya di jalan poros dan tempat umum lainnya”. (Hasil wawancara US, 2 September 2020).

Berdasarkan semua pernyataan ke tiga (3) informan dari pihak pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam manajemen Bencana di Kecamatan Baraka adalah: (a) Adanya program yang diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat. Seperti menghindari pembangunan pemukiman di bawah lereng yang rawan terjadi longsor, relokasi daerah rawan longsor, serta tingkat pengurangan keterjangan lereng dengan

pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. (b) Pemberdayaan sumberdaya Manusia seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya longsor. (c) Pendampingan misalnya perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana serta adanya pendampingan sosial bagi korban bencana alam.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang belum maupun yang telah terjadi sebagai berikut:

“Saya membantu pemerintah tidak banyak, cuma berusaha dengan menjalankan program yang pemerintah daerah berikan misalnya melakukan penghijauan di daerah yang rawan terjadi bencana longsor”. (Hasil wawancara SR, 24 September 2020)

Wawancara selanjutnya dengan masyarakat Desa Kadingeh dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi bencana sebagai berikut:

“Kalau terjadi bencana alam, misalkan tanah longsor, saya melapor ke pemerintah daerah bukan hanya ada jika ada bencana baru saya melapor tapi jika ada tanda tanda tanah akan longsor saya juga akan laporkan, namun kadang kadang longsor datang tanpa disadari seperti yang pernah saya alami sebelumnya”. (Hasil wawancara TS, 27 September 2020)

Hasil wawancara dengan dua (2) informan dipihak masyarakat penulis menyimpulkan bahwa kerjasama dari pihak masyarakat dalam membantu pemerinah daerah dalam manajemen bencana misalnya tanah longsor.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan melakukan penanaman tanaman di area yang rawan bencana yang dapat menahan pencegah tanah longsor masyarakat telah berhasil membantu mensukseskan salah satu

program pemerintah yaitu penghijauan, dan dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada pihak pemerintah daerah dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan lapisan masyarakat yang terkait dalam mengambil tindakan mengenai cara penanganan bencana secara baik yang terjadi maupun yang belum terjadi.

2. Faktor Penghambat

Dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa faktor yang bisa saja menjadi penghambat. Berhubungan dengan faktor penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“Kecamatan Baraka yang hampir 100% wilayah pegunungan dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan bencana longsor yang cukup tinggi” (Hasil wawancara SR, 26 September 2020)

Informan melanjutkan faktor penghambat dalam menanggulangi bencana seperti tanah longsor sebagai berikut:

“Anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk korban bencana selama ini belum sepenuhnya mencukupi, mengingat setiap tahun terutama musim penghujan sering terjadi bencana seperti tanah longsor. Dana tersebut juga tidak semata-mata hanya difokuskan kepada penanggulangan bencana tanah longsor, melainkan dana tersebut juga masih dibagi untuk keperluan bencana lainnya”. (Hasil wawancara SR, 26 September 2020)

Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa lokasi dan anggaran yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang menjadi

penghambat dalam menanggulangi terjadinya resiko bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat korban bencana yaitu:

“Pemerintah daerah memang membantu tapi bantuan yang dilakukan lambat, dari pihak pemerintah daerah daerah meminta maaf kepada kami mengenai terlambatnya penanganan dikarenakan jalanan akibat longsor sangat sulit untuk dilewati”. (Hasil wawancara YS, 28 September 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas menjadi faktor penghambat dalam manajemen bencana. Penulis menyimpulkan bahwa rusaknya jalan raya menjadi kendala pemerintah dalam melakukan penanganan secepat mungkin.

Berdasarkan semua pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka adalah: (a) faktor geologis (b) kurangnya anggaran dana (c) Rusaknya fasilitas umum.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tanggungjawab Bersama

Hasil penelitian menyebutkan bahwa lebih dari separuh informan merasa bahwa kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebagian telah terlaksana dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam memberikan kontribusinya berupa tenaga maupun fikiran dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah.

Dalam menanggulangi bencana ada beberapa dinas yang ikut terlibat di dalamnya diantaranya dinas sosial yang bertanggung jawab memberi bantuan berupa logistik maupun sumbangan, dari dinas kesehatan bertanggung jawab berupa melakukan evaluasi serta membangun sistem peringatan dini tentang bencana dan pemerintah desa bertugas untuk segera melaporkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Pemerintah dan Masyarakat daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Tentu saja upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 27 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja. Untuk itu masyarakat pun memiliki andil dalam penanganan bencana, peran masyarakat menjadi elemen yang paling pening karena kekuatan pemerintah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar.

Dari hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa masyarakat yang ada Kecamatan Baraka harus bekerjasama dengan baik

untuk meminimalisir Bencana. Masyarakat dan pemerintah harus melakukan kerjasama seperti Sosialisasi tentang penghijauan, Memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, serta membuat sistem peringatan dini mengenai bencana alam. Dalam hal ini penanggungjawab bersama-sama yaitu pemerintah dan masyarakat dimana peran pemerintah sangat penting bagi penanggulangan Bencana peran pemerintah yaitu menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan atau Bantuan nasional. Adapun peran masyarakat berperan serta dalam perencanaan, memelihara keseimbangan dengan tidak melakukan pembukaan lahan pertanian baru demi kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya pencegahan Bencana, Bekerjasama pemerintah dalam upaya mitigasi, bersedia bekerjasama mewujudkan Desa tangguh bencana.

Pernyataan tokoh masyarakat mengungkapkan kerjasama yang dibangun antara pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian akibat bencana, sehingga dalam mengantisipasi semuanya telah dilakukan sosialisai prabencana.

2. Saling Berkontribusi

Berkontribusi berasal dari kata kontribusi yang artinya sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang

terintegrasi. Individu dikatakan bekerjasama jika upaya-upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk kontribusi dari dinas sosial yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang berdampak bencana, seperti pengadaan dapur umum di lokasi bencana tanah longsor, kontribusi dari dinas kesehatan memfasilitasi jadwal kunjungan konsultasi medis serta kontribusi dari masyarakat yaitu melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan wawancara dilihat bahwa pemerintah sudah mengarahkan kemampuan berupa tenaga dan pikirannya dalam dalam hal penanggulangan bencana dalam hal ini kontribusi dari pemerintah di Kecamatan Baraka yaitu Pemerintah turun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau para korban di lokasi, meskipun pemerintah terlambat turun ke lokasi serta membeikan bantuan tim penolong misalnya tim sar serta bantuan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, serta obat-obatan. Pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana. Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana tanpa menunggu instruksi dari pemerintah ketika terjadi darurat sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa karena sudah ada bekal sebelumnya. Sehingga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan tanggap darurat.

Namun berbeda halnya dengan penuturan warga lain yang juga merupakan warga di Desa Kadingeh, yang mengatakan bahwa pemerintah terlambat mengunjungi lokasi kejadian ketika terjadi bencana di daerah mereka. Pemerintah lambat turun ke lokasi kejadian ketika terjadi bencana dan masyarakat menyangkan hal tersebut, karena menurut sebagian masyarakat mereka tidak bisa melakukan pembenahan di lokasi kejadian bencana jika tidak ada pemerintah setempat yang berada di lokasi kejadian.

3. Pengarahan Kemampuan Secara Maksimal

Pengarahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat yang terkena bencana sangatlah penting dari arahan pemerintah masyarakat mengetahui akan pentingnya kelestarian lingkungan, bahaya dan dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi bencana dalam hal ini bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus ikut andil dalam hal penanggulangan bencana. Dalam hal ini pengarahan kemampuan secara maksimal dari pihak pemerintah di Kecamatan Baraka yaitu baik dari segi fikiran dan tenaga contohnya memberikan bantuan kepada para korban bencana. Sedangkan dari pihak masyarakat pengarahan kemampuan secara maksimal di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu ikut andil dalam membantu korban bencana yang terjadi di daerahnya dengan harapan untuk mengurangi beban para korban bencana, dan tentunya masyarakat tetap menerima petunjuk dari pemerintah setempat.

Bentuk kemampuan yaitu setiap anggota memahami tugasnya masing-masing baik dari dinas sosial maupun dari dinas kesehatan namun dalam hal ini mereka masih tetap berupaya saling membantu dengan semaksimal mungkin mengingat dalam setiap kegiatan pasti memiliki kekurangan masing-masing. Pengarahan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.

Dalam manajemen pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menuntut manusia, juga menuntut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Tujuan pokok dari pengarahan nampak dari prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan, akan semakin besar sumbangan bawahan untuk usaha mencapai tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan hubungan atau bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

Keterangan salah satu anggota kabid Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan memberikan penjelasan tentang perannya dalam mengurangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan mengarahkan semua instansi yang terkait, karena dengan hal tersebut barulah sebuah perencanaan matang dapat dibuat untuk mengurangi bencana.

Hasil wawancara dengan informan, dan pengamatan langsung oleh peneliti dapat dikatakan bahwa dalam mengurangi dampak bencana alam Camat menghimbau/mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa dan masyarakatnya agar melakukan kerjasama yang baik untuk meminimalisir dampak bencana.

Keterangan dua informasi masyarakat di Desa Kadingeh mengenai pengarahan kemampuan secara maksimal dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dari peraturan di atas menjelaskan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu bekerjasama dengan baik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah bekerja sama dengan baik oleh pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

1. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu, (a) tanggung jawab secara bersama-sama: Dalam menanggulangi suatu bencana tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja. Adapun bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat di kecamatan Baraka seperti sosialisasi tentang penghijauan, pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian baru, bergotong royong membantu masyarakat yang berdampak bencana, sedangkan peran masyarakat yaitu berperan serta dalam perencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, dan bersedia bekerjasama mewujudkan desa tangguh bencana. (b) Saling berkontribusi: Dari hasil wawancara dilihat bahwa pemerintah sudah berkontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah telah melaksanakan fungsi kontrol dan fungsi antisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari penanggulangan bencana seperti mengenali daerah yang rawan akan bencana tanah longsor terutama di sekitar lereng yang curam, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman

yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat hal ini untuk menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa di kurangi, serta tidak membangun pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana longsor.

Dari penuturan salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mengantisipasi bencana. (c).

Pengarahan kemampuan secara maksimal: Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

2. Faktor pendukung Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di desa Kadingeh Kecamatan Baraka yakni, kerjasama yang baik dapat mendukung suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor pendukung penanggulangan bencana alam khususnya tanah longsor dan faktor pendukung lainnya yaitu pendampingan. Faktor penghambat Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka yakni (a) faktor geologis (b) kurangnya anggaran dana (c) Rusaknya fasilitas umum.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam misalnya tanah longsor, untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tetap bersinergi dalam melakukan penanggulangan bencana baik yang belum maupun yang telah terjadi.
3. Masyarakat harus tetap mengambil peran penting dalam menangani penanggulangan bencana. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah bencana tanah longsor.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suhasimi, & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media & FIP UNY.
- Arikunto, Suharsimi, 2007, *Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bakornas. 2008. *Penanggulangan Bencana Banjir 2007/2008*. Jakarta.
- Bowo, Andi, 2007. *Kerjasama*. Yogyakarta : Pustaka Larasati.
- DepKes RI, 2005. *Pedoman Puskesmas dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta: DepKes RI 2005.
- Edralin dan Whitaker. 2009. *Prinsip Good Governance*. Jakarta : Bina Aksara.
- Femi Gusparidi. 2015. *Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*.
- Griffin, Ricky W dan Ronald J, Ebert. 2006. *Bisnis Jilid 1 Edisi 8* : Jakarta
- Griffin Ricky. 2003. *Manajemen (Edisi 7, Jilid 1)*. Ahli Bahasa : Gina Gania Jakarta : Erlangga
- Hariato, Heru Sri, 2001. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Jakarta : Profil Manggalla Agri
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu s.p. 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Keban. 2009. *Prinsip Kerjasama*. Jakarta : Rosda.
- Komadis, 2007. *Penanggulangan Bencana*. UGM : Yayasan IDEP.
- Maarif, Syamsul. 2012. PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana*. Jakarta.
- Madura, Jefe. 2007. *Pengantar Bisnis Edisi 4*. Jakarta : Salemba 4.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, Medan : Graha Indonesia.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Ali, dkk, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Faza Media
- Nurjannah, dkk. 2010. *Manajemen Bencana*. Bandung Alfabeta.

- Perda No.2 tahun 2010 *tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dan badan penanggulangan bencana.*
- PHO/WHO *Pan American Health Organization World Health Organization Manajemen dan Logistic: Bantuan Kemanusiaan dalam Sektor Kesehatan.* Jakarta: EGC, 2007
- Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Bencana.* Jakarta : Dian Rakyat.
- Richard L. Daft. 2011. *Era Baru Manajemen.* Jakarta : Salemba Empat.
- Safiee, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan.* Bandung : Mandar Maju.
- Santabari Barbara, 2009. *Fase-fase Bencana dalam Penanggulangan.* Bandung : Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solihin, Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility From Sumber Daya Charity To Sustainability.* Jakarta : Salemba 4.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. R&D.* Bandung: Alfabeta
- Syarif Ahmad. 2016. *Pentingnya Informasi dan Komunikasi pada Informasi Kebijakan Penyelenggara Penanggulangan Bencana.*
- Thomson dan Perry dalam Keban, 2007. *Enam Dimensi Strategi Administrasi: Konsep, Teori, dan Isu.* Yogyakarta : Gava Media.
- Paripurno, Eko Teguh, 2008. *Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas: Alternatif dari bawah,* Jurnal Kebijakan Publik Edisi 1 Juni, Tahun 2008, Departemen dan Informatika, Jakarta.
- Wahyudi Firman. 2016. *Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.*
- West (2002). *Kerjasama Yang Efektif.* Cetakan kelima. Penerjemah : Srikandi Waluyo. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Yohanes, Yahya. 2006, *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- UU No. 23 Tahun 20014 *Tentang Pemerintah Daerah.* Undang-Undang Negara Republik Indonesia

UU No.24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tribun Timur.com



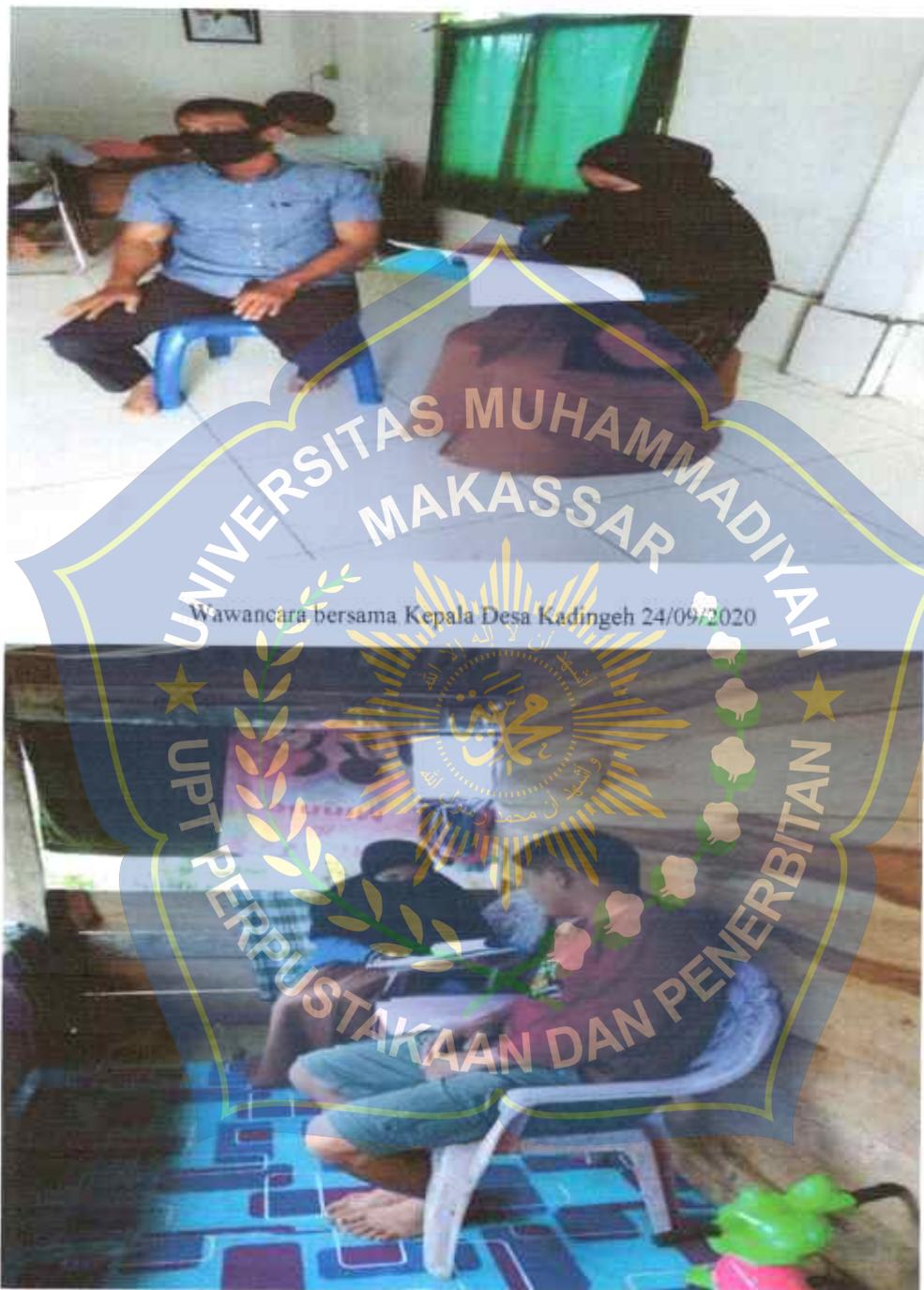




Gambar : Wawancara dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang 25/08/2020



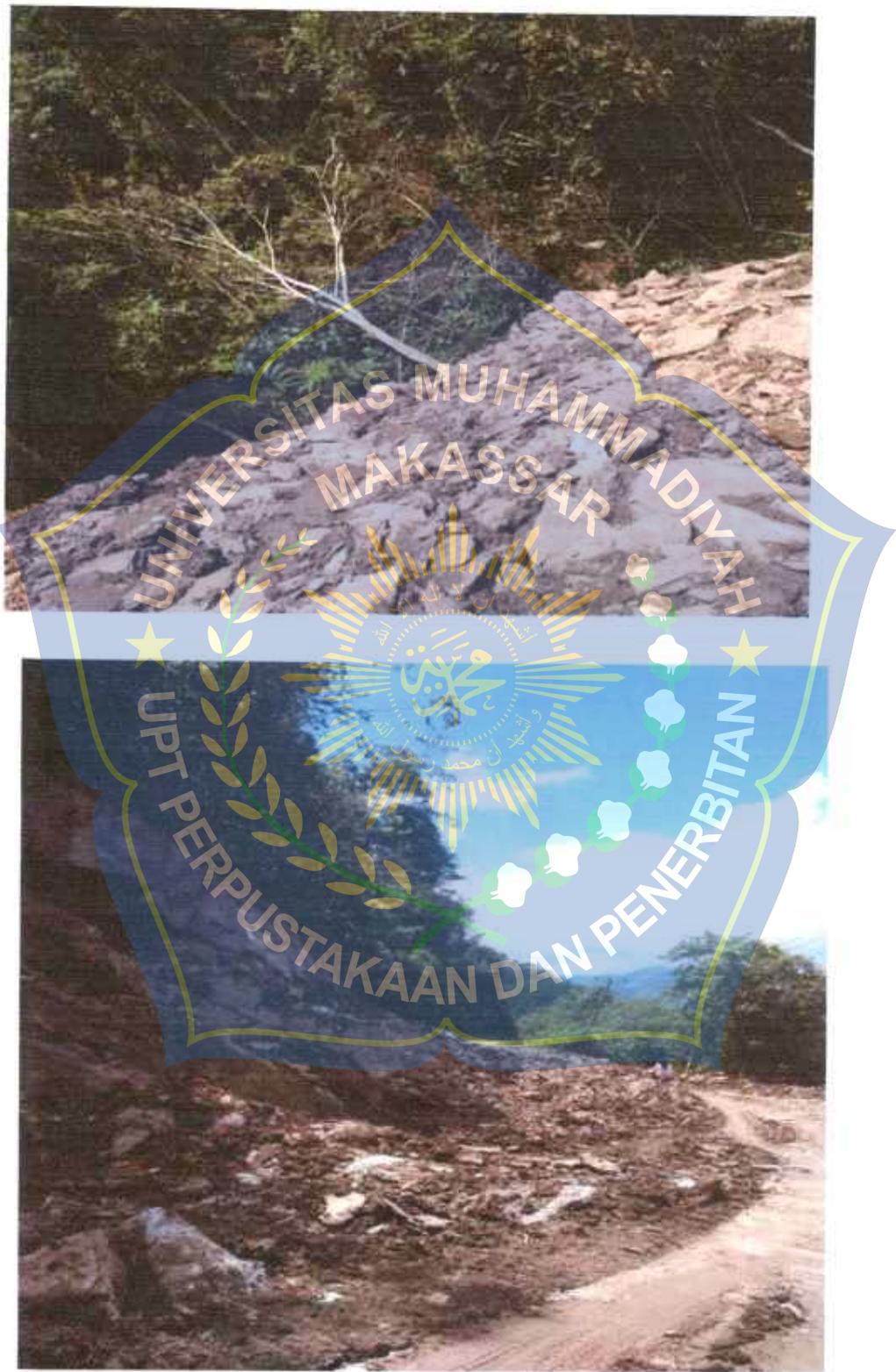
Gambar : Wawancara bersama pak Camat Baraka 26/09/2020



Wawancara dengan warga yang berdampak bencana 24/092020



Wawancara dengan warga yang berdampak bencana 24/09/2020

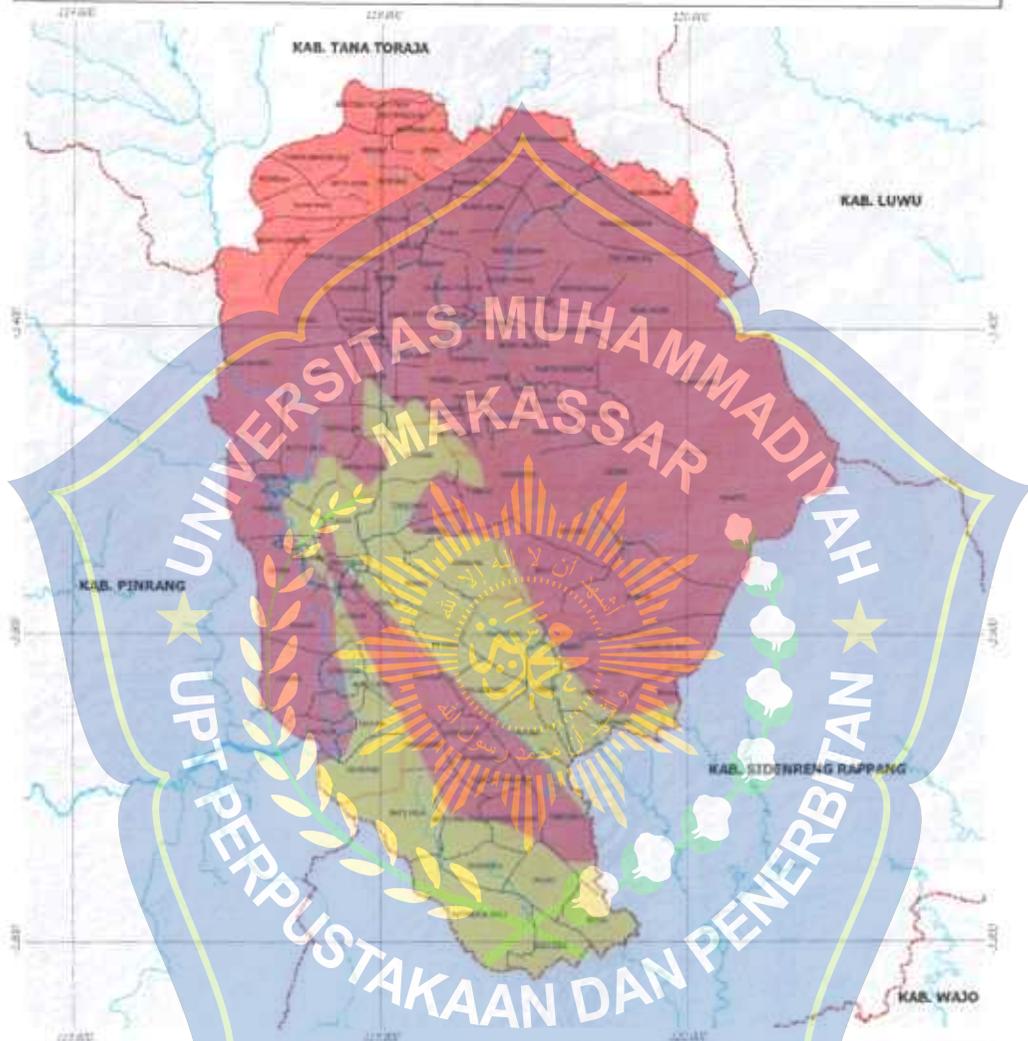


Gamba : Bencana tanah longsor



Gambar: Pembukaan lahan pertanian baru

PETA RISIKO LONGSOR KABUPATEN ENREKANG



| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|--------|--------|--|
| <p>Keterangan Lokasi</p> | <p>Legenda</p> <table border="0"> <tr> <td> Batas Kabupaten</td> <td>Risiko Longsor</td> </tr> <tr> <td> Batas Kecamatan</td> <td> Rendah</td> </tr> <tr> <td> Batas Desa</td> <td> Sedang</td> </tr> <tr> <td> Sungai</td> <td> Tinggi</td> </tr> </table> | Batas Kabupaten | Risiko Longsor | Batas Kecamatan | Rendah | Batas Desa | Sedang | Sungai | Tinggi | <p>Informasi Kartografi</p> <p>Skala : 1:250.000 pada ukuran A4 1 cm di peta sama dengan 2,5 km di lapangan</p> |
| Batas Kabupaten | Risiko Longsor | | | | | | | | | |
| Batas Kecamatan | Rendah | | | | | | | | | |
| Batas Desa | Sedang | | | | | | | | | |
| Sungai | Tinggi | | | | | | | | | |
| <p>Sumber</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Enrekang Tahun 2014 2. Peta Republik Indonesia (RRI) 1:50.000 3. Data Digital PODES Tahun 2013 4. Peta Geologi FGG - Badan Geologi 5. Data BPHG Sulawesi Selatan 6. Data Enrekang Dalam Angka Tahun 2013 7. OpenStreetMap 8. Hasil Rapor Risiko Bencana Sulawesi Selatan 2015 | <p>PENELITIAN HASIL KEMENTERIAN ENREKANG BALAI PENANGKALAN DAN BENCANA DAERAH (PPB)</p> <p>Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Toppo - 040212804 Email : info@enrekang.go.id Balai : balai.enrekang@ppb.go.id</p> | <p>Proyekor Lokal : UTM, Zona 50 S dan 33 S Proyektor Geograph : UTM - Supur Datum UTM : WGS-84 Grid Unit : UTM - Supur dengan interval antar grid 10,2 derajat</p> <p>Keterangan Dokumen</p> <p>ID Peta / Map ID : 2015-07-05_Prose_kvlen_SULSEL Dibuat tanggal : 05-07-2015</p> | | | | | | | | |



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor: 4505/S.01/PTSP/2020
Lampiran:
Perihal: Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Enrekang

Tempat

Berdasarkan surat Ketua Prodi. Ilmu Administrasi Negara FISIP UNISMAK Makassar Nomor
0866/05/C.4.6/V/19.11/2020 tanggal 30 Agustus 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pemilik dibawah ini

Nama: EYA MUSTIKA
Nomor Pokok: 105110110116
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Umbar: Mahasiswa(S1)
Alamat: Jl. Alauddin No. 209, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul

"KERJASAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MANAJEMEN BENCANA DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG"

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus s.d 17 Oktober 2020

Selubungan dengan hal tersebut diatas, saya persetujui untuk mengizinkan dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian

Demikian surat ini saya sampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktori di Makassar
Pada tanggal 08 Agustus 2020

AN. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROVINSI
SULAWESI SELATAN
Balai Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I
Np: 19710501 199803 1 004

Lampiran: 1
1. Surat Perizinan Penelitian FISIP UNISMAK Makassar di Makassar
2. Perizinan

MAKASSAR, 08 AGUSTUS 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinrang Enrekang Telp/Fax (0420)-21879
ENREKANG

Enrekang, 18 Agustus 2020

Nomor : 264/DPMP/TSP/IP/VIII/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Desa Kadlengah
 Di-
 Kec. Baraka

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 4505/S.01/PTSP/2020 tanggal 06 Agustus 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Evo Muzalia
 Tempat Tanggal Lahir : Ulu, 19 Agustus 1983
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Ulu Desa Lodon kec. Buntu Batu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Desa/Kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Ketahanan Pemantahan dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadlengah Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang."

Dilaksanakan mulai, Tanggal 18 Agustus 2020 s/d 11 Oktober 2020

Pengikut Anggota :-

- Pada Pesisirnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat
 2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diteliti
 3. Menikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
 4. Menyajikan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Badan Enrekang Uji Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
 Kepala DPMP/TSP Kab. Enrekang


 Dr. M. A. IDRIS, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NoP : 19051231 198502 4 002

- Tembusan PA:
01. Bupati & Wakil Bupati (Aspirasi)
 02. Bupati DPMP/TSP Kab. Enrekang
 03. Kepala Desa Ulu Lodon
 04. Camat Baraka
 05. Kecamatan/Mahasiswa/Instansi
 06. Kang Bersangkutan (Izin Penelitian)
 07. Bertanggal





PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BARAKA
DESA KADINGEH
KADINGEH

Nomor : Jn. Desa Barak Kadingeh 003/DK/X/2020

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 003/DK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kadingeh menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nama | EVA MUSTIKA |
| Tempat Tanggal Lahir | Ulu, 19 Agustus 1997 |
| Instansi/Pekerjaan | Mahasiswa |
| Alamat | Ulu, Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu |

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian mulai Tanggal 18 Agustus 2020 s.d 12 Oktober 2020 di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan keadaban yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kadingeh, 12 Oktober 2020

Kepala Desa Kadingeh


SUDAR, S.P.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



EVA MUSTIKA, dilahirkan di Kabupaten Enrekang tepatnya di Uru Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu 19, Agustus 1997.

Anak keempat dari lima bersaudara lahir dari pasangan suami istri Tapa dan Ammi. Peneliti bertempat tinggal di jalan

Talasalapang 1 no.3. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD Negeri 89 Uru pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baraka dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMA Model Negeri 5 Enrekang pada tahun 2013 dan selesai pada 2016. Karena peneliti memiliki keinginan kuat dalam hal pendidikan maka peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul "Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Desa Kadingeh di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang" dan mendapatkan gelar S.Sos